

BAB I

PENDAHULUAN

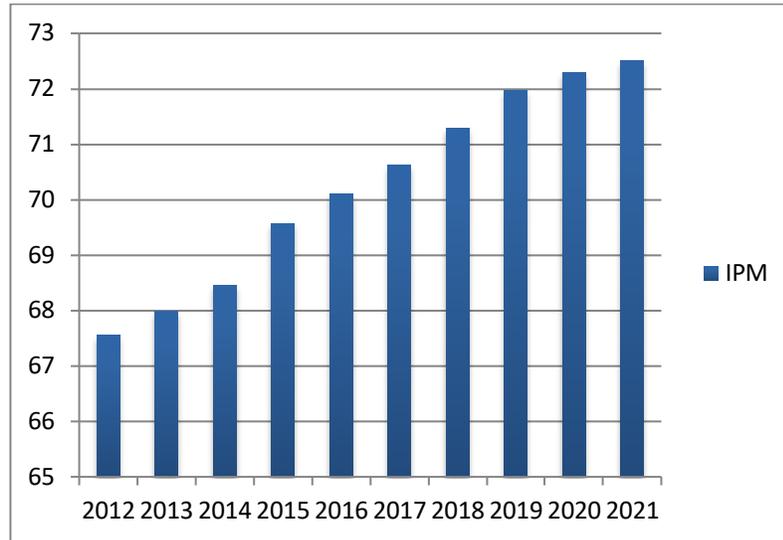
A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* pada tahun 1990 dengan membandingkan angka harapan hidup, pendidikan, serta standar kehidupan. Pembangunan manusia yang diusahakan oleh seorang manusia pun berkaitan dengan manusia dan ditujukan untuk manusia pula. Penetapan skala prioritas pada pembangunan manusia memiliki beberapa faktor seperti kemiskinan, keadilan, efisiensi, hingga faktor hak asasi manusia (Alkire, 2015). Kemampuan seorang manusia dalam melakukan produktivitas sangat berpengaruh pada pembangunan manusia karena individu itu sendiri merupakan agen dari pertumbuhan yang paling efektif untuk pencapaian pembangunan (Septiana, 2015).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mencakup empat komponen utama yakni angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan nilai pengeluaran masyarakat. Berhasil atau tidaknya pembangunan manusia disuatu daerah sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam mengupayakan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2021 menunjukkan *tren* positif, peningkatan tersebut tentunya tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mencapai 72,5% yang mana angka tersebut meningkat sebesar 0,21% dibandingkan pada tahun sebelumnya.

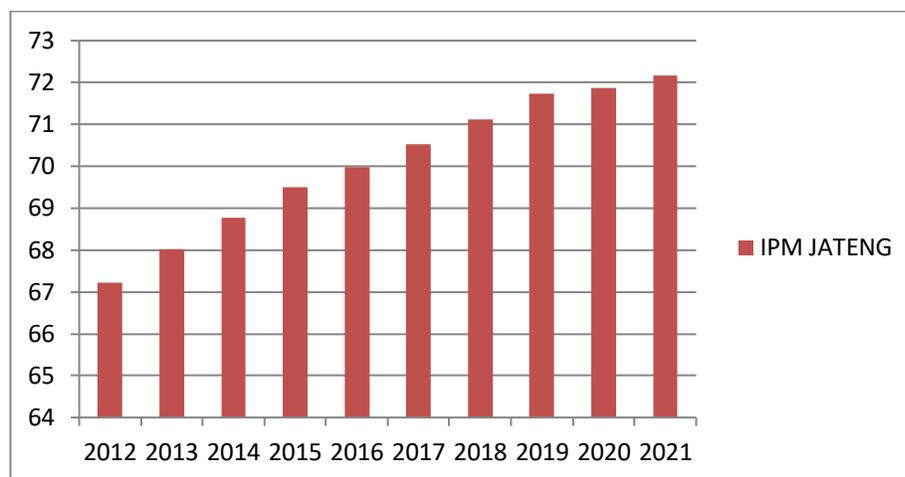
Grafik 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 67.55 meningkat 0.43 di tahun 2013 kembali naik sebesar 0.48 di tahun 2014 hingga tahun-tahun selanjutnya selalu meningkat dan memiliki nilai 72.50 di tahun 2021.

Grafik 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah



Sumber : Badan Pusat Statistik

Trend kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mempengaruhi

kenaikan di Jawa Tengah seperti pada gambar diatas peningkatan secara signifikan karena upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan untuk mengejar target pembangunan daerah. Akan tetapi hal lain yang menjadi sorotan apabila pertumbuhan mengalami kenaikan adalah angka kemiskinan yang juga ikut naik (Anindyka, Pratomo and Kurnia, 2018).

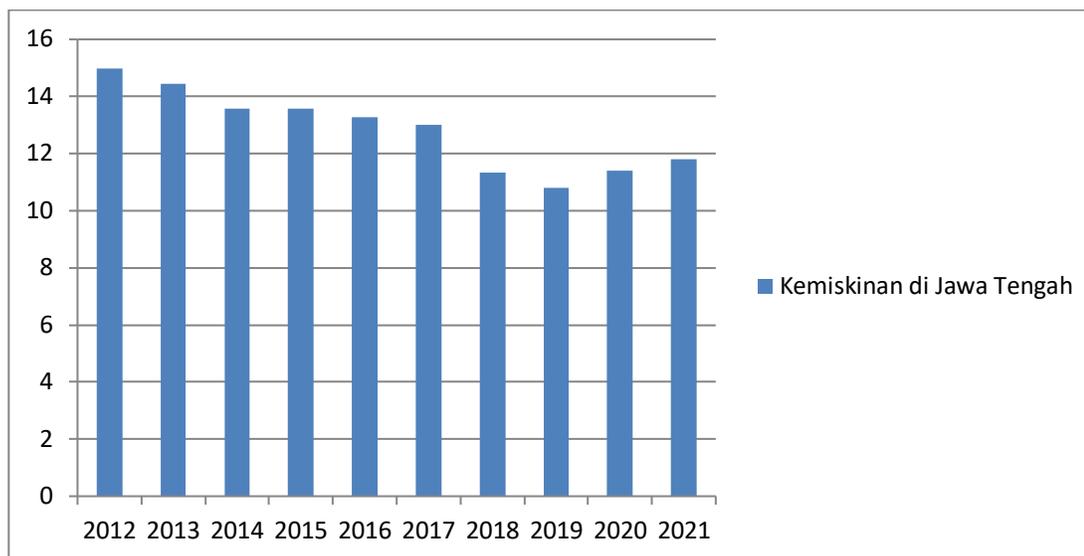
Tabel 1.1. Presentase Indeks Pembangunan Manusia di 6 Provinsi

Prov.	2018	2019	2020	2021	rata-rata
DKI Jakarta	80.47%	80.76%	80.77%	81.11%	80.77%
Banten	71.95%	72.44%	72.45%	72.72%	72.39%
Jawa Barat	71.30%	71.03%	72.09%	72.45%	71.96%
DIY	79.53%	79.99%	79.97%	80.22%	79.92%
Jawa Timur	70.77%	71.50%	71.71%	72.14%	71.53%
Jawa Tengah	71.12%	71.73%	71.87%	72.16%	71.72%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mengacu pada publikasi Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, peringkat Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah masuk kedalam posisi dua terendah dibandingkan empat provinsi lainnya di pulau jawa. Selain dari indikator-indikator pada Indeks Pembangunan Manusia kemiskinan dianggap menjadi salah satu faktor utama penyebab rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi Indonesia walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi angka kemiskinan di Indonesia pun masih sangat tinggi.

Grafik 1.3. Presentase Kemiskinan di Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik diatas menggambarkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, angka kemiskinan sempat menurun walaupun kembali meningkat pada dua tahun terakhir. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi karena presentasenya diatas 10%.

Dampak buruk yang sangat terasa yang diakibatkan oleh kemiskinan ialah menjadi tidak berkembangnya sumber daya manusia. Hal ini memberikan dampak yang jauh lebih buruk lagi seperti masyarakat miskin biasanya cenderung mengabaikan pendidikan dan kesehatannya (Jasasila, 2020).

Ketidaksejahteraan masyarakat miskin tentu saja dipengaruhi oleh faktor lain selain kemiskinan, sumber daya manusia yang tidak berkualitas menyebabkan seseorang sulit mencari lapangan pekerjaan karena tiak sesuai kemampuannya. Orang yang sedang menunggu mendapatkan pekerjaan pun dapat disebut pengangguran.

Upah minimum menjadi salah satu topik penting bila berurusan dengan masalah

tenaga kerja.

Tabel 1.2. Upah Minimal Provinsi di Indonesia

Prov.	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	3.648.034	3.940.973	4.276.348	4.417.176
Banten	2.098.384	2.267.990	2.461.986	2.461.984
Jawa Barat	1.545.371	1.667.473	1.811.361	1.810.451
Jawa Timur	1.508.895	1.630.069	1.769.778	1.868.778
Jawa Tengah	1.486.065	1.605.369	1.744.015	1.798.989
DI.Yogyakarta	1.454.154	1.570.933	1.704.629	1.756.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambaran upah dari enam provinsi di pulau jawa kembali menunjukkan Jawa Tengah dalam posisi rendah. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dijelaskan bahwa pendapatan perkapita sangat berkaitan dengan kenaikan sektor perekonomian suatu daerah. Naiknya sektor ini mampu menurunkan angka pengangguran sejalan dengan nilai upahnya yang akan meningkat.

Kesejahteraan masyarakat yang tinggi dapat diamati dari berapa banyak orang yang sudah bekerja. Pada dasarnya kegiatan ekonomi dapat berjalan baik apabila sumber dayanya baik juga (Aziziah and Ekawaty, 2023). Setelah mendapatkan gambaran atas rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, pengangguran, serta upah minimum yang rata-rata beradda di peringkat bawah dibandingkan engan provinsi di pulau jawa yang lain maka penulis tertarik untuk membuat analisis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh permasalahan tersebut dalam **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-**

2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka bisa ditarik pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021?
5. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021?

C. Batasan Masalah

Berikut ialah batasan-batasan pada masalah:

1. Penelitian ini hanya membahas dan menganalisis pengaruh variabel independen yaitu jumlah penduduk, kemiskinan, pengangguran, upah minimum, dan tenaga kerja terhadap *dependent variable* penelitian ini.
2. Penelitian ini memakai data tahunan yang di ambil dari tahun 2012-2021.

D. Tujuan Penelitian

Menurut perumusan masalah yang terdapat dipenelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dijawab yaitu:

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021.
2. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021.
3. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021.
4. Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021.
5. Mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2012-2021.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini ialah manfaat dari hasil yang diharapkan penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan kajian ataupun evaluasi untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang bermisi mensejahterakan warganya.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi tentang pentingnya pembangunan manusia untuk kehidupan yang layak.

3. Bagi Akademisi

Sebagai sumber untuk penelitian tambahan, sebagai referensi, atau sebagai sarana pembelajaran bagi pembaca yang tertarik dengan topik mengenai Indeks Pembangunan Manusia.